



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG LAINNYA

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, terdapat informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif.

Hal-hal tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Pemerintah Kota Malang masih mengalami kendala dalam hal kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan oleh FKTP penyelenggara di lapangan, dikarenakan dana kapitasi JKN dikelola secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD, sehingga proses pelaporan oleh FKTP membutuhkan rekonsiliasi data yang intensif antara FKTP sebagai penyelenggara dan Dinas Kesehatan sebagai entitas akuntansi.
2. Tahun 2016 merupakan tahun kedua Pemerintah Daerah Kota Malang sebagai entitas Pelaporan dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai entitas akuntansi menerapkan SAP Berbasis Akrua, dalam pelaksanaan implementasi SAP berbasis Akrua disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. SKPD sebagai entitas akuntansi belum memahami implementasi SAP berbasis Akrua yang mengakibatkan pada saat proses asistensi terdapat informasi penting yang belum disampaikan ke BPKAD selaku entitas pelaporan, sehingga dibutuhkan pendampingan secara terus menerus.
 - b. BPKAD selaku PPKD telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PPK-SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
3. Pengelolaan Dana Bosnas yang merupakan penggunaan langsung oleh sekolah memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus, terutama



bagi SDM yang mengelola dana, sehingga diharapkan dapat dilakukan pengelolaan dana secara baik dan tertib dalam pelaporannya.